

## **BAB II**

### **HUBUNGAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA PADA ERA SEBELUM PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI GOUGH WHITLAM**

Hubungan antara Australia dengan Indonesia sudah lama terjalin, dimulai dari yang paling awal sekali yaitu sejak zaman pelayaran. Hubungan itu terjadi sejak masa pelayaran yang mulai berkembang di dunia. Telah terjadi interaksi antara suku aborigin dengan suku bugis yang terjalin sejak masa Kerajaan Gowa di Makasar kira-kira sejak tahun 1650. Kedatangan nelayan Suku Bugis ke Australia adalah untuk mencari ikan teripang yang kemudian mereka bawa pulang ke sulawesi. Sambil menunggu angin yang bisa membawa para nelayan Suku Bugis ini pulang untuk sementara mereka mendirikan rumah-rumah, menggali sumur dan menanam pohon asam.

Banyak orang Aborigin yang ikut bekerja dengan nelayan Suku Bugis. Suku Aborigin juga mengikuti kebiasaan menghisap tembakau, menggambar tembakau, mempelajari bahasa Suku Bugis, membuat gambar perahu, dan mempelajari tarian mereka. Ketika tiba masa untuk berlayar pulang ke Sulawesi, ada pula orang Aborigin yang ikut berlayar dan kembali ke Australia pada musim muson selanjutnya, bahkan ada pula yang menetap di Sulawesi. Pengaruh orang Suku Bugis terhadap Suku Aborigin dapat dilihat dari kebiasaan dan bahasa yang digunakan mereka sampai saat ini.<sup>1</sup> Demikianlah hubungan antara Australia dengan Indonesia dimulai.

---

<sup>1</sup> Lew Hird, Geografi Australia Australia Institute (AAI) (Lembaga Australia-Indonesia), *Hubungan antara Australia dan Indonesia*, <http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html>. Diakses pada tanggal 21 Februari 2009, hlm. 2-3. Pukul 21.00 WIB

Bab ini akan membahas mengenai hubungan antara Australia dengan Indonesia pada masa pemerintahan orde lama dan pemerintahan orde baru. Hubungan antara keduanya dalam dua periode tersebut juga mengalami pasang surut.

#### **A. Hubungan Australia dengan Indonesia di bawah Orde Lama**

Interaksi antara Australia dengan Indonesia pada masa Orde Lama diawali menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah selama hampir 350 tahun oleh Belanda, pada mulanya Australia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan kolonial di Indonesia, dan berusaha memberikan simpati kepada usaha-usaha menyelesaikan persoalan kemerdekaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda dan para nasionalis Indonesia. Rasa simpati tersebut pernah diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Australia, Dr. Evvat dalam kunjungannya ke Amerika Serikat.<sup>2</sup> Dukungan Australia ini dirasakan sebagai dukungan moral yang cukup berarti bagi rakyat Indonesia yang baru merasakan arti sebuah kemerdekaan. Hal itu juga dibuktikan dengan sikap Australia dalam agresi militer Belanda baik yang pertama maupun yang kedua.<sup>3</sup> Keterlibatan Australia dalam masalah Indonesia ditunjukkan dengan kebijakan negeri itu yang secara konsisten mendukung Republik Indonesia. Dukungan tampak sejak awal pemerintah Australia yang

---

<sup>2</sup> Zulkifli Hamid, *Sistem Politik Australia*, Bandung: LIP-FISIP-UI/PT Remaja Rosdakarya, 1999, hlm. 419.

<sup>3</sup> J. Siboro, *Sejarah Australia*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti PPLPTK, 1989, hlm. 166.

menjalankan kebijakannya yang konsisten dan radikal, bahkan orang-orang Indonesia mengakuinya dan sangat berterima kasih kepada rakyat dan pemerintah Australia.<sup>4</sup>

Masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda terjadi ketika Inggris dalam Perang Dunia II (dalam masa pendudukan bersama sekutu) menyerahkan Indonesia kembali ke tangan Belanda. Banyak terjadi pertempuran menolak pendudukan kembali Belanda atas Indonesia. Pada awalnya perhatian Australia terhadap Indonesia sangat minim sekali, disebabkan karena Australia berusaha untuk mencegah keterlibatan pasukan-pasukan Australia untuk terlibat secara langsung dalam pertempuran di Jawa dan Sumatera, Australia berusaha untuk menghindari setiap keterlibatannya dalam masalah kolonial di Indonesia.<sup>5</sup>

Pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Australia tidak secara langsung mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Australia masih meragukan kemampuan kaum nasionalis Indonesia dalam membendung komunisme. Meskipun Australia meragukan kemampuan bangsa Indonesia, ideologi Partai Buruh yang anti kolonialisme semakin merasa simpati dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Perdana Menteri Chifley dan Partai Buruh semakin yakin akan kemampuan kaum

---

<sup>4</sup> Hilman Adil, *Hubungan Australia Dengan Indonesia 1945-1962*, Jakarta: Djambatan, 1993, hlm. 30.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 33

nasionalis yang mengakibatkan Australia mendukung keinginan pemerintah Indonesia agar Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia.<sup>6</sup>

Australia sebenarnya dalam menanggapi masalah Indonesia dengan Belanda mencerminkan reaksi dwimuka yang berlanjut hingga Belanda melancarkan aksi militernya yang pertama yaitu 21 Juli 1947. Reaksi dwimuka ini tercermin dari sikap Evvat yang pada tahun 1946 berpikir bahwa Australia mempunyai kepentingan yang besar untuk tetap menjaga tali persahabatan dengan Belanda, sementara di lain pihak Australia akan melakukan segala hal untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia.<sup>7</sup> Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia secara *de facto* dalam Perjanjian Linggarjati yang disepakati pada tanggal 25 Maret 1947. Dalam perjanjian ini disepakati bahwa wilayah Indonesia mencakup Pulau Jawa dan Sumatera.<sup>8</sup>

Dengan disetujuinya perjanjian Linggarjati, Australia melihat persetujuan ini sebagai titik awal sebuah perkembangan bertahap menuju kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Australia adalah salah satu negara yang mengakui republik secara *de facto*, kemudian Australia menyadari bahwa telah terjadi perbedaan tafsir dari pihak Belanda. Australia melihat bahwa parlemen Belanda hanya menerima rencana persetujuan yang berdasarkan “*syarat-syarat Jonkman*”, yang

---

<sup>6</sup> Nur Azizah, *Kerjasama Ekonomi Indonesia-Australia, dalam Prospektif 4* (4), Jakarta: Prospektif, 1992, hlm. 363.

<sup>7</sup> Hilman Adil (1993), *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>8</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 136.

artinya bahwa perjanjian yang sebenarnya tidak diceritakan secara utuh seperti aslinya. Menurut sebuah sumber, Parlemen Belanda tidak menerima hasil Perjanjian Linggarjati.<sup>9</sup> Akibatnya ketegangan-ketegangan mulai muncul akibat perbedaan tafsir mengenai isi perjanjian tersebut. Pihak Belanda tidak dapat menahan diri dan melanjutkan agresinya dengan aksi militer pada tanggal 21 Juli 1947.<sup>10</sup>

Dalam agresi militer pertama yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia, sikap Australia sendiri sangat menentang dan mengutuk aksi ini. Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Australia dalam perundingan gencatan senjata antara Indonesia dengan Belanda.<sup>11</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kini terlibat secara langsung dalam konflik tersebut, yang pada akhirnya menggiring Belanda pada posisi diplomatik yang sulit. India dan Australia sangat aktif mendukung Republik didalam PBB. Sehingga pada bulan Juli 1947, Belanda menyetujui untuk melakukan gencatan senjata dan pada bulan Oktober membentuk Komite Jasa-Jasa Baik PBB yang beranggotakan Amerika Serikat, Australia dan Belgia guna membantu perundingan antara Belanda dengan Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Hilman Adil, *op.cit.*, hlm 51.

<sup>10</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *loc.cit.*

<sup>11</sup> Hadi Soebadio, *Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/PERMESTA*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 162-163.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 339-340.

Akibat tindakannya ini, Australia mendapatkan kecaman dari kalangan pejabat di Den Haag, Belanda. Sementara dalam negeri Australia sendiri terjadi keriuhan akibat sikap Pemerintahan Partai Buruh terhadap masalah Indonesia dengan Belanda. Hal itu dikaitkan dengan masalah batas-batas kewenangan dalam negeri dan menentukan nasib sendiri. Di samping kecaman yang dilancarkan oleh pihak oposisi, ternyata pers Australia juga turut andil dengan menyoroti agresi yang dilakukan oleh Belanda dan memberikan kecaman. Dukungan juga yang diberikan oleh masyarakat Australia, dengan memberikan pandangan kritis terhadap agresi yang dilancarkan oleh Belanda.

Dukungan masyarakat Australia terhadap masalah ini dibuktikan dengan dilakukannya demonstrasi di depan konsulat Belanda di Sidney yang diikuti oleh para mahasiswa dan para buruh galangan pada tanggal 25 Juli 1947. Dukungan masyarakat Australia dilakukan dengan aksi pemogokan total yang diikuti oleh 17 Serikat Buruh. Pemogokan ini ditujukan kepada kapal-kapal Belanda, barang-barang impor dari Belanda, dan terhadap maskapai penerbangan Belanda.<sup>13</sup>

Sikap Australia dalam membela perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga dapat dilihat ketika pada 23 Desember, ia menuduh Belanda telah menyiapkan aksi militernya (dalam agresi militer kedua) dan melanggar piagam PBB, serta meminta agar Belanda dikeluarkan dari PBB.<sup>14</sup> Perdana Menteri Chifley juga memerintahkan wakil Australia di Dewan

---

<sup>13</sup> Hilman Adil, *op.cit.*, hlm 55-58.

<sup>14</sup> Hilman Adil, *op.cit.*, hlm. 84-85.

Keamanan untuk mengajukan kepada dewan masalah mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mencapai penyelesaian sengketa secara permanen.<sup>15</sup> Secara umum, pers Australia juga mengutuk aksi militer Belanda, tetapi sedikit sekali dukungan yang ditujukan oleh pers kepada Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Setelah dukungan yang diberikan oleh pemerintah Australia terhadap bangsa Indonesia dalam masalah mempertahankan kemerdekaan kedaulatan bangsa Indonesia dari Belanda, kembali terjadi guncangan antara Indonesia dengan Australia dalam kaitannya dengan masalah Irian Barat. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan keduanya.

New Guinea Barat adalah fokus dari konflik besar pertama antar Australia dengan Indonesia. Pada tahun 1950 Pemerintahan Menzies menegaskan bahwa Australia memiliki kepentingan strategis yang penting pada masa depan administrasi New Guinea Barat. Bahkan, menurut Percy Spender Australia lebih memiliki kemiripan dengan wilayah Australia di Nieuw Guinea dan Papua.<sup>17</sup>

Antara Indonesia dengan Australia dalam memandang wilayah Irian Barat melalui kacamata yang berbeda. Indonesia mempunyai dua alasan yang dikemukakan untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam kedaulatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>16</sup> Hilman Adil, *op.cit.*, hlm. 88.

<sup>17</sup> Richard Chaufel, *Lingkungan Strategis Australia: Masalah Papua, dalam Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan, dalam Hubungan Politik Bilateral Edisi 1, et all*, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 62.

<sup>18</sup> Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 163.

Sementara itu dari sudut pandang Australia adalah sebaliknya, Irian Barat mempunyai arti yang sangat penting bagi Australia. Ini disebabkan karena pulau Irian sangat strategis jika dipandang dari sudut pertahanan.<sup>19</sup>

Berbagai upaya pemerintah Indonesia dilaksanakan untuk menuntut kembalinya Nieuw Guinea ke wilayah Republik Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dan Australia selalu melakukan berbagai upaya untuk mencegahnya. Upaya Belanda itu antara lain, pada tanggal 21-22 Oktober 1959 Belanda dan Australia menyelenggarakan Konferensi di Canberra dengan agenda pembicaraan yang utama adalah mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mempersatukan Nieuw Guinea (wilayah Belanda dan Australia) menjadi satu negara dikemudian hari. Konferensi ini dilanjutkan setahun kemudian di Hollandia bulan Maret 1960.<sup>20</sup> Proses pelaksanaan Pepera dilakukan dari tanggal 24 Juli hingga bulan Agustus 1969 di delapan kabupaten. Hasil dari Pepera ini menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia.<sup>21</sup>

PBB sendiri dari hasil Pepera ini mengeluarkan Resolusi No. 2504, yang isinya adalah penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya di dalamnya. Sehingga apabila ada upaya untuk memisahkan Irian Jaya dari

---

<sup>19</sup> Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 164.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 16-17.

<sup>21</sup> Delapan kabupaten itu adalah Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura. Lihat: R. Ridhani, *Mayor Jenderal Soeharto: Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 240-242.

NKRI merupakan penentuan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk terhadap piagam PBB sendiri.<sup>22</sup>

Selain masalah Irian Barat, ketegangan antara Indonesia dengan Australia juga dipengaruhi oleh masalah pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI/Permesta terhadap pemerintahan Indonesia. Pemerintah Indonesia menduga bahwa Australia juga terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta dengan memberikan dukungan terhadap para pemberontak.

Pada kurun waktu 1958 sampai dengan tercapainya kesepakatan New York pada tahun 1962, baik Indonesia maupun Australia sama-sama menyadari pentingnya hubungan baik antar kedua negara. Kurun waktu ini dikenal sebagai kurun waktu dimulainya politik bertetangga baik (*good neighborhood policy*) antara Australia dengan Indonesia. Salah satu bentuknya adalah adanya pertukaran kunjungan antar pejabat tinggi pemerintah kedua negara, dengan tujuan untuk memperoleh saling pengertian yang lebih baik.<sup>23</sup> Sejak tahun 1957 pemerintah Australia menyimpulkan bahwa Indonesia telah tercipta kondisi yang akan dapat menggagalkan usaha-usaha untuk membendung ekspansi komunis di Asia Tenggara. Perkembangan lain yang mengecewakan Canberra adalah terus berlangsungnya pembangunan militer di Indonesia akibat masuknya senjata dari blok komunis yang merupakan ancaman potensial bagi keamanan Australia. Pembelian senjata oleh Indonesia dari negara-negara komunis digunakan untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958 yang selangkah demi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 245.

<sup>23</sup> Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 171.

selangkah berhasil menegakkan kembali kekuasaannya di Sumatera dan Sulawesi.<sup>24</sup> Pembangunan kekuatan militer di Indonesia ini dianggap Australia merupakan ancaman terhadap keamanan Australia. Dalam pemberontakan PRRI/Permesta ini, Australia secara rahasia dan sembunyi-sembunyi mendukung *covert operation*<sup>25</sup> yang dilakukan oleh Amerika Serikat.<sup>26</sup>

Terjadinya pemberontakan PRRI/Permesta merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi Australia. Dari sudut pandang Australia hal ini merupakan suatu gerakan yang potensial untuk menjatuhkan rezim Soekarno yang dianggap bertendensi ke arah komunisme dan sikap keras yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam masalah Irian Barat.<sup>27</sup> Keterlibatan Australia sendiri tidak bisa dikatakan secara gamblang, namun ada yang mengatakan bahwa Australia menyetujui ketika CIA menggunakan lapangan udara di Australia atau Nieuw Guinea Australia untuk penerbangan-penerbangan guna mengedrop perlengkapan militer serta misi pemboman.<sup>28</sup> Bentuk keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta bukan hanya dalam bentuk simpati saja, tetapi juga dengan memberikan bantuan berupa perangkat lunak serta berupa peralatan perang dan fasilitas-fasilitas lainnya. Keterlibatan Australia dalam pemberontakan PRRI/Permesta juga didorong oleh adanya pendekatan yang dilakukan oleh Uni Soviet dan Cina

---

<sup>24</sup> Hilam Adil, *op.cit.*, hlm. 14-15.

<sup>25</sup> *Covert operation* adalah operasi yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

<sup>26</sup> Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 189.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

terhadap Indonesia dan juga mendukung tuntutan Indonesia atas Irian Barat.<sup>29</sup>

Keterlibatan Australia ini di satu sisi karena harus membantu Inggris dan Amerika Serikat sebagai negara protektoratnya. Di sisi lain, itu memang demi kepentingan Australia sendiri khususnya dalam masalah Irian Barat.<sup>30</sup>

Kemudian menjelang akhir bulan Februari 1958, pemerintah pusat Jakarta mulai mengadakan operasi militer terhadap para pemberontak.<sup>31</sup> Keberhasilan gerak yang dilakukan oleh pasukan pemerintah pusat yang dapat merebut kembali kota-kota yang dikuasai oleh PRRI di Sumatera maupun Permesta di Sulawesi tanpa menemukan perlawanan yang berarti. Hal ini mengakibatkan kekecewaan CIA, sehingga menghentikan bantuan yang diberikan kepada mereka. Kecepatan tentara Jakarta ini tentu saja mengejutkan para petinggi ketiga negara tersebut. Tampaknya dukungan dan pengiriman senjata-senjata yang diberikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia terhadap para pemberontak, dirasa tidak cukup oleh para pemberontak.<sup>32</sup>

Kemudian Indonesia berhasil menumpas pemberontakan PRRI/Permesta dan berakhir pada tahun 1961. Berhasil ditumpasnya pemberontakan PRRI/Permesta tidak disambut optimis oleh Canberra, hal ini diakibatkan oleh pemberontakan tidak menghasilkan iklim yang menguntungkan perkembangan, ditinjau dari sudut pandang Canberra. Pemberontakan itu bukannya menghasilkan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 226-227.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

<sup>31</sup> Hadi Soebadio, *op.cit.*, hlm. 247.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 253.

tekanan anti-komunis terhadap Presiden Soekarno, justru menghasilkan efek sebaliknya. Sebelum pemberontakan, kebijaksanaan Australia diarahkan agar dapat mencegah Indonesia menjadi negara komunis. Bagi Canberra tinggal dua alternatif yang dapat digunakan untuk menghambat gerak komunisme di Indonesia. Pertama adalah gerakan-gerakan pemberontakan di luar Jawa dan yang kedua adalah faktor angkatan darat.<sup>33</sup>

Canberra pun menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap perkembangan yang terjadi di Indonesia pada periode itu. Indonesia menunjukkan sikap yang bermusuhan terhadap Australia, bahkan Preisdan Soekarno maupun Menteri Luar Negeri Soebandrio pernah menyatakan bahwa Indonesia menganggap Australia sebagai batu penarung bagi pemecahan konflik Irian Barat.<sup>34</sup>

Australia dinilai telah menimbulkan kemarahan Indonesia, karena Australia tetap setia membantu Belanda yang mempertahankan kedudukannya di Irian Barat. Dalam semangat juang yang berkobar di Jakarta, Presiden Soekarno menyuarakan politik ekspansionismenya yang revolusioner, sehingga Australia mulai merasa cemas jika Indonesia juga akan menguasai wilayah timur dari Pulau Irian yang dikuasai oleh Australia. Kemudian akibat campur tangan Amerika Serikat yang memberikan tekanan kepada Belanda, akhirnya Irian Barat

---

<sup>33</sup> Hilman Adil (1997), *op.cit.*, hlm. 14-15.

<sup>34</sup> Hilman Adil, *op.cit.*, 16-17.

diserahkan kepada Indonesia, sehingga hubungan antara Indonesia dengan Australia menjadi berkurang.<sup>35</sup>

## B. Hubungan Australia dengan Indonesia di Bawah Orde Baru

Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik sehubungan dengan pergantian pemerintahan di Indonesia, menyusul percobaan kudeta oleh PKI tahun 1965, yang dikenal dengan Peristiwa Gerakan 30 September (G-30-S/PKI). Munculnya pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto disambut baik oleh kalangan politisi Australia. Australia segera mengakui kepemimpinan Orde Baru, karena Indonesia memperlihatkan sikap anti-komunis yang keras dan menjalankan kebijakan luar negeri yang pro-Barat.<sup>36</sup> Beberapa pengamat mengatakan bahwa politik luar negeri Soeharto berbeda dengan Soekarno yang cenderung lebih agresif, seperti dalam kampanyenya untuk merebut Irian Barat dari Belanda, dan konfrontasinya dengan Malaysia. Sementara itu, Soeharto lebih lunak karena pemerintahannya lebih tertarik dalam membangun ekonomi Indonesia. Menurut pandangan ini, hanya ada pengecualian yaitu dalam hal pengambilalihan Timor Timur, bekas koloni Portugis.<sup>37</sup>

Australia segera bergabung dalam *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI), sebagai kelompok negara-negara donor yang dibentuk khusus untuk

---

<sup>35</sup> Justus M. Van Der Kroef, *Masalah Politik dan Keamanan Australia*, Bandung: Yayasan Paritrana, 1970, hlm. 20.

<sup>36</sup> Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 422

<sup>37</sup> Leo Suryadinata, *Politik Luar Negeri Indonesia Dibawah Soeharto, a.b. Nur Iman Subono*. Jakarta: LP3ES, 1998, hlm. 67.

membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Australia mendukung sepenuhnya gagasan Indonesia bersama beberapa negara Asia Tenggara lainnya, ketika membentuk organisasi regional *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) pada tahun 1968. Tujuan ASEAN yang berusaha menciptakan kestabilan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, berdampak positif bagi Australia. Sekurang-kurangnya hal tersebut dapat mengurangi rasa kehawatiran terhadap isolasi negaranya, serta menjamin rasa aman yang lebih besar bagi Australia.<sup>38</sup>

Sejak tahun 1967 iklim hubungan Australia-Indonesia menunjukkan perubahan yang luar biasa, perubahan itu dicerminkan dalam pernyataan laporan tahunan dari Kementerian Luar Negeri, bahwa “hubungan bilateral Australia dengan Indonesia menjadi baik”. Untuk membangun kembali kontak di bawah cara yang baik, Menteri Luar Negeri Australia membuat dua kunjungan ke Indonesia yaitu pada tahun 1966 dan 1967. Australia juga memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia.

Bantuan Australia terus berlanjut dan alirannya semakin meningkat. Pada bulan Desember 1970 Menteri Luar Negeri Australia William McMahon, pada kunjungannya kepada Menteri Perdagangan Indonesia Dr. Soemitro Djojohadikusumo, mengumumkan dukungan bantuan sipil untuk proyek Indonesia yang bernilai lebih dari \$ 11 juta.

Pada bulan Juni 1968 Perdana Menteri Gorton dan istrinya, berkunjung ke Indonesia yang bermaksud untuk menunjukkan keinginan tidak hanya untuk

---

<sup>38</sup> Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 422-423.

menutup persetujuan antara dua negara tetapi juga untuk kolaborasi di wilayah Asia. Harapan dari kunjungan itu mungkin untuk hasil yang lebih besar.<sup>39</sup>

Satu hal yang mendorong hubungan baik Australia dengan Indonesia adalah soal penentuan garis batas antara Irian Jaya dengan PNG. Australia sebagai Negara yang mewakili kepentingan luar negeri PNG pada tahun 1973 telah berhasil menyepakati penentuan garis batas antara Irian Jaya dengan PNG, dengan Pemerintah Indonesia. sejak itu, hubungan ekonomi dan perdagangan antara Australia dan Indonesia semakin meningkat.

Antara tahun 1972-1988, hubungan Australia dan Indonesia diwarnai oleh beberapa masalah yang mengakibatkan fluktuasinya hubungan tersebut. Soal pertama yang paling mengganggu hubungan kedua Negara bertetangga ini adalah masalah Timor Timur. Persoalan Timor Timur mewarnai kebijakan luar negeri Australia selama jabatan kedua PM Partai Buruh, Whitlam (1974-1975), selama masa koalisi Liberal-Nasional, Fraser (1975-1983), dan ketika PM Buruh, Hawke berkuasa sejak 1983. Sekalipun terjadi perdebatan seru di parlemen, Pemerintah Australia (baik Partai Buruh maupun koalisi Liberal-Nasional) memiliki pandangan yang sama mengenai masalah penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Bagi Pemerintahan Buruh maupun koalisi liberal-Nasional, prioritas tertinggi adalah memelihara hubungan persahabatan dengan Indonesia, dan tidak menghendaki adanya isu-isu yang dapat mengganggu hubungan tersebut. Segera setelah pengakuan *de jure* mengenai penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia, pada tahun 1979 Australia memulai pembicaraan

---

<sup>39</sup> Gordon Greenwood, *Approaches to Asia: Australia Postwar Policies and Attitudes*, Sydney: McGraw-Hill, 1974, hlm. 304-305.

mengenai masalah Timor Gap (Pulau Timur) dengan pihak Indonesia. Pembicaraan mengenai masalah Timor Gap ini tidak selesai sampai berakhirnya pemerintahan koalisi Liberal-Nasional di bawah PM Fraser pada 1983.

Sepanjang tahun 1980-an, hubungan Australia dengan Indonesia selalu digangu oleh persoalan Timor Timur. Sekalipun Pemerintah Australia berusaha memelihara hubungan baik dengan Indonesia, namun media Australia dan beberapa kelompok penekan tidak menghendaki persoalan Timor Timur dihentikan. Memang, kalangan media Australia mempunyai persoalan tersendiri dengan Pemerintah Indonesia, sehubungan dengan tewasnya lima wartawan Australia ketika sedang meliput perang di Timor Timur pada tahun 1975. Kepentingan media Australia tampaknya bertemu dengan aspirasi dari kelompok-kelompok orang Timor Timur yang bermukim di Australia, yang menentang penggabungan Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia. Mereka menggunakan hampir seluruh pers Australia yang berpengaruh untuk melaksanakan kampanye mengecam penggabungan Timor Timur, yang diistilahkan oleh mereka sebagai “pendudukan” atau “pencaplokan”, ke dalam wilayah Indonesia. Gencarnya kecaman kelompok-kelompok tersebut dan media Australia terhadap persoalan Timor Timur, menimbulkan persepsi yang keliru dari Pemerintah Indonesia.

Sikap Pemerintah Australia yang membiarkan kecaman-kecaman pers Australia terhadap persoalan Timor Timur, dipandang Pemerintah Indonesia sebagai sikap yang tidak bersahabat, serta mendukung kepentingan kelompok-kelompok anti-Indonesia. Akibatnya, hubungan kedua negara memburuk antara tahun 1980-1983. Pemerintah Indonesia mengambil langkah keras terhadap

perwakilan-perwakilan media Australia di Indonesia. Beberapa surat kabar Australia dilarang beredar di Indonesia, kantor perwakilan ABC di Jakarta ditutup, karena pembohongan visa kepala perwakilannya ditolak Pemerintah Indonesia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Zulkifli Hamid, *op.cit.*, hlm. 423-425.